

## PENDEKATAN MULTIMODAL TERHADAP LANSKAP LINGUISTIK: TANDA LARANGAN DI KAWASAN WISATA KYOTO JEPANG

Muthi Afifah<sup>1</sup>, Sugihartono<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>) Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia

<sup>1</sup>muthiafifah@upi.edu, <sup>2</sup>sugihartono@upi.edu

### Abstract

This study examines prohibition signs in Kyoto City tourist areas using Brown and Levinson's (1987) politeness theory and the Linguistic Landscape framework (Backhaus, 2006). Prohibition signs, though one way communication, carry high potential for Face Threatening Acts (FTA). Kyoto's cultural context adds layers of meaning, where signage reflects not only function but also aesthetics and local values. A total of 52 signs from Gion Shopping Street and Yasaka Shrine were analyzed, focusing on kebahasaan and visual elements. The findings show a mix of polite and impolite expressions, shaped by signs, content, context, and target audience. Kyoto City signage policy, emphasizing simplicity and harmony, also influences expression choices, limiting bright colours. This study reveals how politeness in public signage is contextually constructed and highlights the role of cultural and spatial factors in shaping public communication.

**Kata kunci:** *Linguistic Landscape; Sociolinguistic; Prohibition Sign*

### PENDAHULUAN

Deng (2014:30) dan Afifah (2023a:101) menyatakan bahwa, sama halnya dengan komunikasi tatap muka, komunikasi melalui papan informasi publik yang ada di kehidupan sekitar kita pun merupakan salah satu bentuk komunikasi. Walaupun, komunikasi dengan papan informasi publik bersifat satu arah, dan tidak memiliki lawan bicara yang spesifik. Schulze (2019: 437) mengatakan, meskipun papan papan informasi publik ditujukan kepada pembaca yang tidak spesifik, lokasi dan isi pesan pada papan tersebut tetap dapat memberikan petunjuk mengenai siapa saja yang diperkirakan menjadi target pembacanya.

Tindak tutur melarang yang membatasi tindakan lawan bicara memiliki potensi tinggi untuk menimbulkan *Face-Threatening Acts* (FTA) jika dilihat dari perspektif Teori Kesantunan Brown dan Levinson (1987). Oleh sebab itu, pembicara perlu berhati-hati dalam melakukan tindak tutur melarang agar tercipta keharmonisan dalam kegiatan berkomunikasi.

Penelitian yang menganalisis mengenai ekspresi ungkapan pada papan informasi publik selama ini, hanya berfokus pada unsur kebahasaannya saja. Namun, menurut Schulze (2019: 117), untuk dapat menganalisis ekspresi pada papan informasi publik secara menyeluruh, unsur-unsur non kebahasaan seperti penggunaan warna, gambar, dan material yang digunakan pun perlu untuk dianalisis.

Artikel ini menganalisis unsur bahasa dan unsur non kebahasaan pada papan larangan yang terdapat pada area wisata kota Kyoto, Jepang. Analisis unsur bahasa mengambil sudut pandang dari aspek kesantunan (*Politeness*) dalam ungkapan-ungkapan yang digunakan pada papan larangan. Sedangkan untuk aspek non bahasa mengambil sudut pandang warna, bahan material, serta piktogram yang digunakan. Kota Kyoto merupakan salah satu destinasi wisata populer di Jepang yang dikenal dengan karakteristik khasnya yang mempertahankan budaya tradisional Jepang secara kuat. Papan-papan informasi, termasuk papan larangan yang ada di Kyoto, tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi kepada pengunjung, tetapi juga dipandang sebagai elemen penting yang mempengaruhi kesan dan citra destinasi wisata tersebut (Hamaguchi, 2021).

## METODE PENELITIAN DAN LANDASAN TEORI

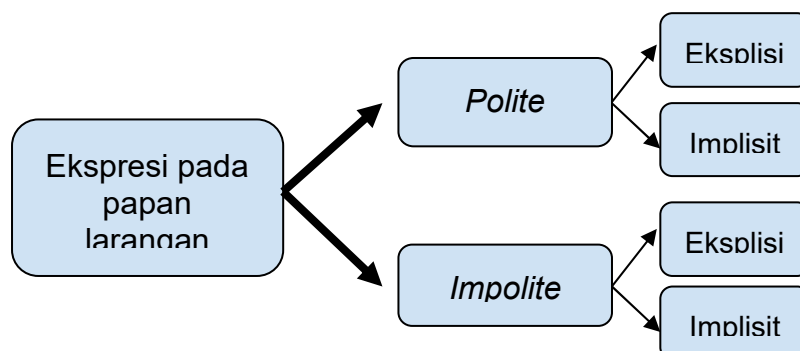
### Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas aspek politeness pada papan informasi publik, seperti oleh Deng (2014), Takiura & Ōhashi (2015), Thongtong (2016), Nishijima (2019), dan Mubarak (2024). Deng (2014) menganalisis papan informasi publik di Cina secara diakronik pada tiga tahapan sejarah dan menemukan bahwa perubahan ekspresi bahasa pada papan-papan informasi publik dipengaruhi perubahan sosial seperti demokrasi dan tingkat literasi masyarakat. Thongtong (2016) meneliti papan informasi publik di kawasan wisata Nimmanhaemin, Chiang Mai, Thailand dan ditemukan bahwa ungkapan sopan digunakan tidak hanya pada papan larangan bahasa Thailand, namun juga ditemukan pada bahasa asing lainnya yang tercantum pada papan informasi publik tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Nishijima (2019) membandingkan ekspresi yang digunakan pada papan informasi publik di Inggris, Jerman, dan Jepang dan menyimpulkan bahwa masing-masing negara memiliki gaya kesantunan yang berbeda-beda. Bahasa Inggris cenderung menggunakan ekspresi yang eksplisit, sementara tanda-tanda dalam bahasa Jepang sering mengandung unsur kehormatan (*honorific*), dan tanda-tanda dalam bahasa Jerman menggunakan frasa infinitif untuk menghindari penyebutan hubungan personal. Mubarak (2024) melakukan analisis penggunaan ungkapan politeness pada papan informasi publik di Jepang dan Indonesia. Dari penelitian ini diketahui bahwa di Jepang lebih banyak penggunaan ekspresi yang eksplisit untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau hal-hal berbahaya lainnya.

Penelitian di atas menggunakan objek berbagai papan informasi publik. Namun, karena penelitian ini fokus hanya pada papan larangan, maka kita perlu melihat penelitian sebelumnya yang mengambil objek hanya papan larangan saja. Diantaranya ada Kim (2011), Kishie (2011), Takiura & Ōhashi (2015), Kurabayashi (2020), Afifah (2022), (2023), dan (2024). Kim (2011) membandingkan ekspresi larangan pada papan larangan yang ada di Jepang dan Korea. Dari penelitian tersebut, ditemukan adanya perbedaan penggunaan ekspresi larangan berdasarkan lokasi papan larangan itu ada dan menunjukkan bahwa bahasa Korea menggunakan ekspresi yang lebih eksplisit dibandingkan bahasa Jepang. Kishie (2011) mencatat tren peningkatan penggunaan kalimat eksplisit, meski sebagian masih banyak dihindari untuk alasan penerimaan sosial masyarakat. Takiura & Ōhashi (2015) meneliti komunikasi dalam ranah publik berbahasa Jepang melalui tanda-tanda larangan yang banyak ditemukan di ruang publik. Dari penelitiannya, diketahui bahwa menentukan ekspresi yang tepat untuk papan larangan dalam bahasa Jepang cukuplah rumit, karena adanya sistem ragam sopan (*keigo*) dalam bahasa Jepang. Penelitian Kurabayashi (2020) menekankan bahwa dalam situasi berbahaya, ekspresi eksplisit lebih umum, sementara dalam konteks layanan pelanggan, ekspresi implisit lebih disukai agar tidak membebani pembaca.

Afifah (2022), Afifah (2023), Afifah (2024a) dan Afifah (2024b) menganalisis ekspresi larangan pada papan larangan Jepang dan Indonesia di berbagai tempat, serta menyimpulkan bahwa konteks lokasi mempengaruhi pilihan ekspresi. Afifah (2022) juga mengembangkan klasifikasi berdasarkan ragam kesantunan seperti yang ditunjukkan oleh diagram 1. Kemudian, Afifah (2023b) tidak hanya meneliti unsur bahasa, tetapi juga aspek visual seperti warna dan desain papan larangan. Hal ini didukung oleh Schulze (2019:98) yang menekankan pentingnya unsur nonkebahasaan seperti warna dan gambar dalam menyampaikan pesan secara menyeluruh.

Diagram 1. Kategori Ungkapan Pada Papan Larangan Berdasarkan Ragam Kesantunan



## Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan kerangka teori *Linguistic Landscape* (Backhaus, 2006) yang memandang tanda-tanda linguistik di ruang publik sebagai wujud komunikasi visual yang dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan budaya. Dalam konteks ini, papan larangan tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga mencerminkan norma dan nilai sosial masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada teori multimodalitas yang dikembangkan oleh Kress & van Leeuwen (2006), yang menyatakan bahwa makna tidak hanya dibangun melalui teks kebahasaan, melainkan juga melalui interaksi berbagai mode semiotik seperti gambar, warna, tata letak, dan material. Kedua teori ini digunakan secara terpadu untuk menganalisis bagaimana pesan larangan dikonstruksi melalui kombinasi unsur kebahasaan dan nonkebahasaan dalam konteks budaya lokal Kyoto.

Dalam mengkaji aspek kesantunan bahasa Jepang, penelitian ini mengacu pada kerangka kerja keigo (sistem ragam sopan bahasa Jepang), serta klasifikasi ekspresi larangan berdasarkan dimensi eksplisit-implisit dan *polite-impolite* sebagaimana dikembangkan oleh Afifah (2023b). Dengan pendekatan ini, ekspresi larangan pada papan dianalisis berdasarkan bentuk kalimat, tingkat kesopanan, dan makna implisit yang terkandung.

## Masalah Penelitian

Jika merujuk pada penelitian sebelumnya yang sudah dipaparkan di atas, ekspresi dalam papan larangan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, persepsi terhadap pembaca. Bukan hanya unsur bahasanya saja, namun termasuk juga unsur non bahasanya (warna dan desain visual). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana ekspresi kesantunan (*politeness*) digunakan dalam papan larangan di area wisata Kyoto Jepang. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada unsur kebahasaannya saja, namun memasukan unsur nonkebahasaan (warna dan desain) pada objek analisisnya.

Kyoto dipilih karena merupakan kota wisata yang kaya akan budaya tradisional Jepang. Berdasarkan data dari situs resmi *Japan Tourism Statistics* (2024), Kyoto menempati peringkat keempat sebagai destinasi wisata dengan jumlah wisatawan terbanyak, baik dari dalam maupun luar negeri, setelah Tokyo, Osaka, dan Chiba. Sementara itu, menurut situs resmi Pemerintah Prefektur Kyoto (2023), jumlah pengunjung ke Prefektur Kyoto pada tahun 2023 tercatat mencapai 75.180.000 orang dalam satu tahun. Meskipun berada di peringkat keempat, Kyoto memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan Tokyo, Osaka, dan Chiba. Kyoto dikenal sebagai “kota budaya” karena selama lebih dari 1.000 tahun menjadi pusat perkembangan budaya Jepang, serta hingga kini masih mempertahankan berbagai tradisi budaya tersebut (Situs Resmi Pemerintah Prefektur Kyoto, 2025).

Kyoto memiliki pedoman khusus dalam pembuatan papan informasi publik yang disebut “*kankou annai hyoushiki appugureedo shishin*” (Kebijakan perbaikan tanda petunjuk wisata) yang juga mengatur papan larangan yang ada di area wisata Kyoto. Dalam kebijakan tersebut, terdapat instruksi bagaimana papan informasi publik dibuat, bukan hanya bentuk secara fisik, namun juga dari segi bahasa yang digunakannya. Penulis membuat rumusan masalah penelitian ini adalah seperti di bawah ini:

1. Bagaimana bentuk ekspresi kesantunan (*politeness*) pada papan larangan di area wisata Kyoto?
2. Bagaimana unsur warna dan bahan material papan larangan mendukung keselarasan lanskap pada area wisata tradisional di Kyoto?
3. Bagaimana wujud representasi multimodal yang menggabungkan unsur kebahasaan dan nonkebahasaan pada papan larangan di area wisata Kyoto?

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi deskriptif-kualitatif dengan pertimbangan pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam strategi komunikasi yang terkandung pada papan larangan di area wisata Kyoto. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan

hanya sekedar menghitung kecenderungan saja, namun juga menafsirkan fenomena sosial kebahasaan serta budaya melalui tanda-tanda bahasa maupun non bahasa di ruang publik.

Sumber data dan objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah papan larangan yang terdapat di area wisata Gion Shopping Street dan Yasaka Shrine Kyoto, Jepang. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kerja lapangan dengan merujuk pada metode penelitian Linguistic Landscape yang dipelopori oleh Backhaus (2006). Selama proses pengumpulan data, peneliti menelusuri area yang telah ditentukan sambil mendokumentasikan seluruh papan larangan yang terlihat dalam bentuk foto. Selanjutnya, data tersebut ditranskrip ke dalam file Excel untuk mempermudah proses analisis. Total data yang dianalisis berjumlah 52 papan larangan. Objek analisis pada penelitian ini meliputi aspek-aspek di bawah ini.

1. Unsur kebahasaan seperti Kata, frasa, kalimat (struktur linguistik)
2. Unsur Makna dan gagasan (bentuk larangan, tingkat kesopanan)
3. Unsur nonkebahasaan (warna latar, warna huruf, material papan, pictogram)

### Teknik pengumpulan data

Seperti yang telah disebutkan juga di atas, teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan metode kerja lapangan. Di bawah ini merupakan tahapan pengumpulan data yang lebih rinci.

1. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi lapangan sebagai berikut.
2. Menentukan lokasi observasi (Gion dan Yasaka Shrine)
3. Mendokumentasikan papan larangan yang ditemukan melalui foto
4. Mencatat lokasi, bentuk papan, dan konteks penempatan papan
5. Mentranskripsi isi papan ke dalam file Excel

### Teknik Analisis Data

Berikut adalah teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Klasifikasi papan larangan berdasarkan bentuk ekspresi (eksplisit/implisit) dan tingkat kesantunan (polite/impolite) berdasarkan teori Afifah (2023b).
2. Analisis aspek bahasa, mengidentifikasi bentuk kalimat larangan, jenis keigo, dan makna pragmatis yang terkandung dalam setiap ekspresi.
3. Analisis aspek non kebahasaan dengan menganalisis unsur warna, material, dan pictogram menggunakan teori multimodalitas (Kress & van Leeuwen, 2006).
4. Interpretasi, yaitu menafsirkan keterkaitan antara bentuk ekspresi bahasa dan non bahasa dalam menyampaikan pesan larangan dalam konteks budaya Kyoto.
5. Dengan menggunakan teori dan metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam mengenai representasi larangan dalam ruang publik Jepang, khususnya di area wisata tradisional Kyoto.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada masalah penelitian, pertama-tama akan dijelaskan analisis terkait ekspresi kesantunan pada papan larangan. Sebanyak 52 sampel data yang terkumpul dikategorikan sebagai tuturan santun dan tuturan tidak santun berdasarkan klasifikasi yang mengacu pada Afifah (2023b).

Penelitian ini mengacu pada klasifikasi yang dikemukakan oleh Afifah (2023b), yang membagi ekspresi pada papan larangan ke dalam 4 kategori berdasarkan dua dimensi, yaitu tingkat kesantunan (polite atau impolite), dan bentuk penyampaian (eksplisit atau implisit). Kategori tersebut meliputi, (1) ekspresi *impolite* dalam kalimat eksplisit, (2) ekspresi *impolite* dalam kalimat implisit, (3) ekspresi *polite* dalam kalimat eksplisit, (4) ekspresi *polite* dalam kalimat implisit.



Gambar 1. 「立入禁止」'Tachiiri kinshi' (larangan masuk)



Gambar 2. 「不法投棄監視中」'Fuhou touki kanshi chuu' (Dalam pengawasan terhadap pembuangan ilegal)



Gambar 3. 「京都では路上喫煙禁止です」'Kyouto de wa rojyou kitsuen kinshi desu' (Di Kyoto dilarang merokok di Jalanan).

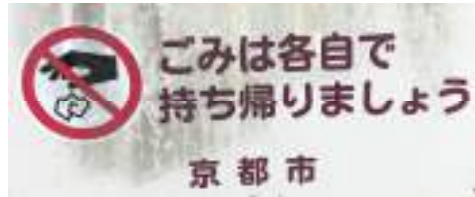


Gambar 4. 「この付近、お車の駐車はご遠慮下さい」'Kono fukin, o kuruma no chuusha wa go-enryou kudasai' (Mohon untuk segan memarkirkan kendaraan di sekitar area ini).





**Gambar 5.** 「自転車・オートバイを垣にもたれかさないで下さい」 '*Jitensha, ootobai o kaki motarekasanaide kudasai*' (Jangan senderkan sepeda atau motor di tembok)



**Gambar 6.** 「ごみは各自で持ち帰りましょう」 '*Gomi wa kakuji de mochikaerimashou*' (Mari bawa pulang sampah masing-masing)



**Gambar 7.** 「この区域で路上喫煙すると過料1千円が科されます」 '*Kono kuiki de rojyou kitsuen wo suruto karyou issen-en ga kasaremasu*' (Jika merokok di jalanan wilayah ini, akan dikenakan denda seribu yen)

Gambar 1 hingga 7 di atas merupakan contoh data yang menunjukkan variasi ungkapan larangan pada papan larangan yang ditemukan di wilayah Gion, Kyoto. Gambar 1 memperlihatkan variasi ekspresi larangan kelompok (1), yaitu ekspresi *impolite* dalam kalimat eksplisit. Gambar 2 menampilkan ekspresi larangan dari kelompok (2), yaitu ekspresi *impolite* dalam kalimat implisit. Gambar 3, gambar 4, dan gambar 5 menyajikan ekspresi larangan dari kelompok (3), yakni ekspresi *polite* dalam kalimat eksplisit. Sementara itu gambar 6 dan gambar 7 memperlihatkan contoh ekspresi larangan kelompok (4), yaitu ekspresi *polite* dalam kalimat implisit. Pada bagian berikutnya akan dibahas lebih lanjut perbedaan ekspresi larangan pada masing-masing kelompok tersebut.

Gambar 1 dan 2 sama-sama menggunakan ekspresi larangan yang tergolong *impolite*. Namun, keduanya memiliki perbedaan dari segi bentuk penyampaian, yaitu eksplisit pada gambar 1, dan implisit pada gambar 2. Keduanya dapat dikategorikan menggunakan ekspresi *impolite* karena tidak menggunakan bentuk ragam sopan bahasa Jepang seperti akhiran 「です」 '*desu*', 「ます」 '*masu*' maupun bentuk perintah sopan 「下さい」 '*kudasai*'.

Pada gambar 1 tertulis 「立入禁止」 '*Tachiiri kinshi*' (larangan masuk) yang secara gramatikal terdiri dari dua buah nomina kebahasaan 「立入」 '*tachiiri*' (masuk) + 「禁止」 '*kinshi*' (larangan). Keberadaan unsur 「禁止」 '*kinshi*' (larangan) secara langsung menandakan bahwa kalimat ini merupakan bentuk larangan secara eksplisit.

Sebaliknya, pada gambar 2, tertulis ungkapan 「不法投棄監視中」 '*Fuhou touki kanshi chuu*' (Dalam pengawasan terhadap pembuangan ilegal). Ungkapan ini tidak menyatakan larangan secara langsung, melainkan hanya menyampaikan informasi bahwa area tersebut sedang diawasi terhadap kegiatan pembuangan ilegal. Oleh karena itu, bentuk larangan bersifat implisit. Pembaca diharapkan menafsirkan sendiri bahwa karena area tersebut berada dalam pengawasan, maka pembuangan sampah ilegal tidak diperkenankan. Gambar 3, gambar 4, dan gambar 5 merupakan papan larangan yang termasuk dalam kelompok (3), yaitu ekspresi *polite* dalam kalimat eksplisit. Meskipun ketiganya sama-sama menggunakan strategi ekspresi larangan yang sopan dan eksplisit, struktur kalimat yang digunakan dalam masing-masing kalimat berbeda.

Pada gambar 3 tertulis ungkapan 「京都では路上喫煙禁止です」 '*Kyouto de wa rojyou kitsuen kinshi desu*' (Di Kyoto dilarang merokok di Jalanan). Ungkapan ini memiliki struktur yang serupa dengan ekspresi larangan pada gambar 1 karena sama-sama menggunakan unsur 「禁止」 '*kinshi*' (larangan). Namun, perbedaannya terletak pada penggunaan akhiran 「です」 '*desu*', yang merupakan bentuk ragam sopan dalam bahasa Jepang, sehingga membuat kalimat tersebut termasuk dalam kategori ekspresi polite.

Sementara itu, pada gambar 4 terdapat ungkapan 「この付近、お車の駐車はご遠慮下さい」 '*Kono fukin, o kuruma no chuusha wa go-enryou kudasai*' (Mohon untuk segan memarkirkan kendaraan di sekitar area ini), dan pada gambar 5 tertulis 「自転車・オートバイを垣にもたれかさないで下さい」 '*Jitensha, ootobai o kaki motarekasanaide kudasai*' (Jangan senderkan sepeda atau motor di tembok). Kedua ungkapan ini menggunakan bentuk perintah sopan 「下さい」 '*kudasai*', namun, dengan susunan gramatikal yang berbeda. Kalimat pada gambar 4 menggunakan pola kalimat imperatif nomina-verba 「ご遠慮下さい」 '*go-enryou kudasai*' yang merupakan ungkapan permohonan untuk menahan diri (retriksi secara sopan). Sedangkan, kalimat pada gambar 5 menggunakan struktur verba bentuk negatif + 「下さい」 '*kudasai*' → 「もたれかさないないで下さい」 '*motarekasanaide kudasai*', yang secara langsung membentuk larangan eksplisit dalam bentuk kalimat perintah negatif.

Meskipun 「ご遠慮下さい」 '*go-enryou kudasai*' tidak secara struktural merupakan bentuk negatif dari perintah, ekspresi ini lazim digunakan dalam konteks larangan dalam budaya tutur bahasa Jepang. Oleh karena itu, penutur asli tetap menafsirkan ungkapan ini sebagai bentuk larangan, bukan sebagai ajakan atau perintah biasa. Dengan demikian, gambar 4 dan gambar 5 sama-sama mencerminkan ekspresi larangan yang disampaikan secara eksplisit dan sopan, namun melalui struktur ungkapan yang berbeda. Gambar 6, dan gambar 7 sama-sama menunjukkan papan larangan yang termasuk dalam kategori ekspresi polite dalam bentuk kalimat implisit. Pada jenis ungkapan ini, larangan tidak dinyatakan secara langsung, melainkan melalui bentuk kalimat yang bersifat eksplisit serta menggunakan ragam sopan atau polite. Karena bersifat implisit, pembaca tidak secara langsung diarahkan atau dibatasi perilakunya, melainkan dituntut untuk menafsirkan makna larangan berdasarkan konteks dan implikatur yang muncul dari kalimat tersebut.

Meskipun ketiganya tergolong dalam kategori yang sama, cara penyampaian pada masing-masing gambar menunjukkan variasi struktur gramatikal dan strategi pragmatis yang berbeda. Gambar 6, gambar 7, dan gambar 8 memiliki cara penyampaian yang berbeda-beda. Pada gambar 6 tertulis 「ごみは各自で持ち帰りましょう」 '*Gomi wa kakui de mochikaerimashou*' (Mari bawa pulang sampah masing-masing). Ungkapan ini menggunakan bentuk ajakan sopan verba bentuk 「～ましょう」 '*~mashou*', yang secara gramatikal merupakan bentuk ajakan. Berdasarkan penjelasan Afifah (2023b: 124), sejak kejadian terorisme pada tahun 1995 yang terjadi di Tokyo, Jepang mulai mengurangi jumlah tempat sampah di ruang publik, terutama di stasiun dan tempat wisata. Oleh karena itu, muncul bentuk himbauan seperti ini untuk mencegah pembuangan sampah sembarangan, dengan mengajak pengunjung membawa pulang sampah masing-masing. Meskipun secara eksplisit tidak menyatakan larangan, ajakan untuk membawa pulang sampah ini secara implisit melarang tindakan membuang sampah di tempat tersebut.

Sementara itu, gambar 7 menampilkan ungkapan 「この区域で路上喫煙をすると過料1千円が科されます」 '*Kono kuiki de rojyou kitsuen wo suruto karyou issen-en ga kasaremasu*' (Jika merokok di jalanan wilayah ini, akan dikenakan denda seribu yen). Kalimat ini menyatakan konsekuensi dari suatu tindakan tanpa secara langsung menyatakan larangan. Artinya, bentuk larangan bersifat implisit dan memberikan informasi mengenai hukum yang akan dikenakan. Pembaca diharapkan dapat menyimpulkan bahwa karena tindakan tersebut beresiko dikenai sanksi, maka perilaku tersebut tidak diperkenankan. Selain itu, penggunaan akhiran 「ます」 '*masu*' menunjukkan bahwa kalimat tersebut disampaikan dalam ragam sopan, sehingga termasuk dalam kategori ekspresi polite. Setelah dijelaskan contoh-contoh data berdasarkan kategori ekspresi larangan yang digunakan, hasil kategorisasi tersebut dirangkum dan disajikan pada tabel 1 di bawah

ini. Dengan tabel tersebut, dapat terlihat bagaimana kecenderungan penggunaan ungkapan larangan yang ditemukan dari dalam data yang terhimpun.

**Tabel 1:** Kategori Ungkapan ragam sopan dan tidak sopan pada papan larangan di Kyoto

Kategori Ungkapan Larangan	Jumlah
Ekspresi <i>impolite</i> dalam kalimat eksplisit	24
Ekspresi <i>impolite</i> dalam kalimat implisit	2
Ekspresi <i>polite</i> dalam kalimat eksplisit	20
Ekspresi <i>polite</i> dalam kalimat implisit	4
Ekspresi <i>impolite</i> dalam kalimat eksplisit	1
Ekspresi <i>polite</i> dalam kalimat eksplisit	1
Ekspresi <i>impolite</i> dalam kalimat eksplisit	1
Ekspresi <i>polite</i> dalam kalimat implisit	1
Jumlah keseluruhan	52

Tabel satu menunjukkan bahwa penggunaan papan larangan yang menggunakan ekspresi *impolite* dan *polite* berjumlah sama, yaitu masing-masing 26 buah. Temuan ini menunjukkan bahwa ekspresi yang digunakan pada papan larangan di area wisata Kyoto tidak terdapat kecenderungan dominan terhadap penggunaan salah satu jenis ekspresi *polite* atau *impolite*.

Hasil ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Afifah (2023a). Afifah (2023a) menganalisis mengenai papan larangan yang terdapat di kebun binatang. Walaupun kebun binatang merupakan area wisata juga, namun memiliki karakteristik yang berbeda dengan area wisata budaya tradisional Kyoto. Dari hasil analisis Afifah (2023a), karena kebun binatang memiliki banyak pengunjung keluarga yang membawa anak, maka di kebun binatang terdapat banyak papan larangan yang khusus ditujukan untuk anak-anak. Sehingga banyak papan larangan yang menggunakan bahasa percakapan anak-anak yang menggunakan ekspresi *impolite*.

Hasil ini pun tidak sejalan dengan hasil penelitian Afifah (2022) dan Mubarok (2024) yang menganalisis papan larangan dan papan informasi publik yang ada di stasiun dan kereta yang ada di Jepang. Dalam hasil penelitian Afifah (2022) dan Mubarok (2024), ditemukan bahwa penggunaan ragam ekspresi *polite* mendominasi ekspresi yang digunakan pada papan larangan maupun papan informasi publik yang terdapat di stasiun dan kereta. Bahkan, untuk beberapa papan larangan yang berisi informasi pencegahan kecelakaan, ditemukan penggunaan ragam *polite*. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Kishie (2011) yang mengatakan bahwa papan informasi publik yang berkaitan dengan pencegahan kecelakaan seringkali menggunakan ekspresi *impolite*, karena mengedepankan tersampainya informasi kepada pembaca secara efektif. Namun, Kurabayashi (2020) mengatakan, bahwa papan larangan yang dipasang di lingkungan yang berorientasi pada layanan cenderung menggunakan ekspresi yang sopan untuk meminimalkan terjadinya *Face-Threatening Acts* (FTA).

Walaupun stasiun kereta bukanlah area wisata, keduanya memiliki karakteristik yang mirip. Kemiripan tersebut adalah papan larangan ditujukan kepada pengunjung atau yang dalam istilah bahasa Jepang disebut '*okyakusama*' (お客様). Atau dalam kata lain "berorientasi pada pelayanan". Dalam budaya Jepang, saat berkomunikasi dengan '*okyakusama*' diharuskan berbicara dengan ragam bahasa sopan (*polite*) atau yang dalam istilah bahasa Jepang disebut '*taigu hyougen*' (待遇表現).

Penggunaan ekspresi papan larangan di area wisata Kyoto menunjukkan distribusi yang seimbang antara ekspresi *polite* dan *impolite*. Jika dianalisis lebih dalam hubungan antara informasi yang disampaikan dan ekspresi yang digunakannya sekalipun, tetap tidak terlihat kecenderungan ke salah satu jenis ekspresi. Dari total 52 data yang dikumpulkan, 42 data papan larangan memuat informasi mengenai ketertiban umum seperti larangan merokok, larangan memotret, larangan parkir, dan sebagainya. Dari 42 data tersebut, 21 papan menggunakan ekspresi *polite*, dan 19 papan menggunakan ekspresi *impolite*. Perbandingan ini menunjukkan bahwa tidak terdapat dominasi yang signifikan antara kedua jenis ekspresi tersebut. Jika ditinjau lebih rinci berdasarkan jenis



larangannya, ditemukan bahwa larangan tertentu seperti dilarang merokok, dilarang masuk, dan dilarang memotret lebih sering menggunakan ekspresi *impolite*, terutama dengan menggunakan kata ‘*kinshi*’ 禁止 yang berarti ‘larangan’

Kyoto memiliki panduan aturan khusus yang mengatur pembuatan papan informasi publik (2013), namun tidak secara spesifik mengatur penggunaan ekspresi *polite* mau *impolite*. Aturan yang tercantum dalam pedoman tersebut hanya menetapkan prinsip umum dalam pembuatan papan informasi publik seperti penggunaan bahasa yang sederhana, penyertaan dua hingga empat bahasa (termasuk bahasa Jepang), serta pemanfaatan pictogram untuk memudahkan pemahaman bagi wisatawan mancanegara. Dengan tidak adanya ketentuan eksplisit terkait tingkat kesopanan bahasa yang digunakan, pilihan antara ekspresi *polite* atau *impolite* diserahkan kepada kebijakan masing-masing. Hal ini menjelaskan mengapa dalam data yang dikumpulkan menghasilkan hasil yang seimbang antara jumlah penggunaan ekspresi *polite* dan *impolite*, serta hasil yang berbeda dibandingkan dengan kebun binatang (Afifah: 2022) dan stasiun kereta (Afifah: 2023a), (Mubarak: 2024).

Prinsip “simple” yang terdapat pada pedoman penulisan papan informasi publik Kyoto dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pemilihan ekspresi larangan *impolite*. Perhatikan gambar 8, dan gambar 9 di bawah ini. Ekspresi larangan yang bersifat *impolite*, seperti ‘*kin-en*’ 禁煙 (dilarang merokok), cenderung lebih singkat dan mudah dimengerti dibandingkan dengan ekspresi *polite* seperti ‘*kono kuiki de no rojyou kitsuen wa kinshi sareteimasu*’ この区域での路上喫煙は禁止されています (merokok di jalan pada area ini dilarang). Hal ini sesuai dengan pernyataan Deng (2011) yang menekankan bahwa papan informasi publik harus menyampaikan pesan dengan sesederhana mungkin mengingat keterbatasan ruang pada media yang digunakan. Dengan demikian, prinsip “simple” ini dapat menjelaskan mengapa ekspresi *impolite* tetap banyak digunakan, terutama pada papan-papan larangan yang menyampaikan informasi seperti larangan merokok, larangan memotret, dan larangan masuk.



Gambar 8. ‘*kin-en*’ 禁煙 (No Smoking)



Gambar 9. ‘*kono kuiki de no rojyou kitsuen wa kinshi sareteimasu*’ この区域での路上喫煙は禁止されています (Merokok pada area ini dilarang)

Tabel 2 di bawah, menunjukkan bahwa papan informasi yang memuat larangan no smoking, no photography, dan no entry cenderung lebih banyak menggunakan ekspresi *impolite* dibanding ekspresi *polite*. Hal ini dapat dilihat dari jumlah data yang menunjukkan dominasi penggunaan bentuk larangan eksplisit seperti ‘*kin-en*’ 禁煙 (Dilarang Merokok), ‘*satsuei kinshi*’ 撮影禁止 (Dilarang Memotret) dan ‘*tachiiri kinshi*’ 立入禁止 (Dilarang Masuk) tanpa tambahan ungkapan sopan ‘*keigo*’ 敬語 bahasa Jepang. Ekspresi *polite* seperti ini memiliki kesan tegas, namun ringkas dan mudah dipahami oleh pembaca

**Table 2.** Penggunaan Ungkapan Larangan pada Tanda “Dilarang Merokok”, “Dilarang Memotret”, dan “Dilarang Masuk”

Tipe Ungkapan	Dilarang Merokok	Dilarang Memotret	Dilarang Masuk
① Ekspresi <i>impolite</i> dalam kalimat eksplisit	11	5	8
② Ekspresi <i>impolite</i> dalam kalimat implisit	0	0	0
③ Ekspresi <i>polite</i> dalam kalimat eksplisit	3	0	4
④ Ekspresi <i>polite</i> dalam kalimat implisit	2	0	0
Jumlah	16	5	12

Aspek nonkebahasaan yang dibahas dalam analisis ini adalah desain papan larangan yang terdapat di area wisata Kyoto. Desain yang dimaksud mencakup elemen visual seperti warna dan bahan material yang digunakan dalam pembuatan papan tersebut. Afifah (2023b) memainkan peran penting dalam menarik perhatian dan menyampaikan tingkat urgensi, di mana warna-warna mencolok seperti kuning, merah sering digunakan untuk menandai larangan atau bahaya (Murakoshi: 2002). Sementara itu, bahan material seperti logam, kayu dan plastik bukan hanya mencerminkan formalitas serta memiliki daya tahan.

Desain papan informasi publik di Kyoto diatur dalam kebijakan “*Kankou Annai Hyoushiki Appugurēdo Shishin*” atau Pedoman Peningkatan Tanda Petunjuk Wisata. Poin utama dari kebijakan ini adalah “visibilitas”, yaitu kemudahan papan informasi publik untuk dilihat serta tampilan yang sesuai dengan lingkungan sekitar tempatnya dipasang. Aspek visibilitas ini dijabarkan ke dalam lima elemen, yaitu estetika (tidak merusak pemandangan dan memiliki bentuk yang menarik), ekonomis (biaya pembuatan yang sesuai), perawatan (mudah diganti dan dirawat), material (menggunakan bahan dengan karakteristik khas), dan pemasangan (dapat dipasang dengan mudah di mana pun serta tidak memakan tempat). Namun, dalam artikel ini, pembahasan difokuskan hanya pada dua aspek, yaitu estetika (termasuk pemilihan warna) dan material yang digunakan, karena keduanya memiliki pengaruh besar terhadap persepsi visual dan kesesuaian papan larangan dengan lanskap budaya dan lingkungan Kyoto.

Penggunaan warna pada papan larangan di Kyoto mengikuti kebijakan khusus yang berbeda dari wilayah Jepang lainnya yang disebut ‘*Kyoto-shi Yagai Koukoku-butsu no Shikisai ni Tsuite*’ 京都市屋外広告物の色彩について (Mengenai warna papan informasi umum di luar ruangan di Kyoto). Berdasarkan peraturan tersebut, warna mencolok seperti merah dan kuning dilarang digunakan di ruang publik untuk menjaga keselarasan lanskap kota yang dipenuhi bangunan bersejarah, serta agar tidak lebih mencolok dari warna merah khas kuil Shinto yang banyak terdapat di Kyoto. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Hamaguchi (2021), warna dari papan informasi publik di Kyoto haruslah menyesuaikan dengan warna lingkungan sekitar, sehingga papan informasi publik di Kyoto disarankan untuk menggunakan warna-warna tidak mencolok seperti coklat dan abu-abu.

Setelah mengkaji mengenai kebijakan-kebijakan yang berlaku di Kyoto terkait desain papan informasi publik, langkah selanjutnya adalah menganalisis implementasi nyata dari papan larangan yang ada di lapangan, yang sudah dihimpun pada penelitian ini. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana papan larangan tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kyoto. Tabel 3 di bawah ini menyajikan data mengenai warna-warna

yang digunakan pada papan larangan yang menjadi objek penelitian ini. Jika terdapat dua pemakaian warna, warna yang dituliskan pertama adalah warna yang mendominasi pada papan larangan tersebut.

**Tabel 3.** Warna pada Papan Larangan

Warna Latar	Jumlah
krem, coklat	1
coklat	4
<b>putih</b>	<b>36</b>
putih, coklat	1
putih, merah	5
putih, merah, kuning	1
putih, kuning	1
hijau	1
kuning	2
<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>52</b>

Dengan melihat ke tabel 3 di atas, dapat kita ketahui bahwa warna putih yang merupakan warna yang paling dominan digunakan, dengan jumlah sebanyak 36 dari total 52 papan. Selain itu, kombinasi warna putih dengan warna lain seperti merah, coklat dan kuning juga ditemukan dari dalam data walau jumlahnya sangat sedikit. Warna coklat yang dianggap dinamis dengan kota tua Kyoto hanya ditemukan sebanyak 5 buah. Sementara warna-warna mencolok seperti merah, coklat, dan kuning hanya digunakan sebagai kombinasi dengan warna putih dengan jumlah hanya 3 saja. Hal ini menunjukkan Kyoto menghindari warna-warna yang mencolok, namun penggunaan warna coklat masihlah sangat terbatas. Penggunaan dasar warna putih pada papan larangan sangatlah dominan. Hasil ini sejalan dengan temuan Afifah (2023b) yang menunjukkan bahwa papan larangan di Jepang umumnya didominasi oleh latar berwarna putih. Dominasi warna putih tersebut didasari oleh pertimbangan bahwa latar putih mampu meningkatkan keterbacaan dan kejelasan informasi yang disampaikan melalui papan larangan.



gambar 10: Latar Putih



gambar 11. Latar Putih dan Bingkai Merah



gambar 12: latar Coklat

Pada beberapa foto berikut. Foto 10 menggunakan papan larangan dengan latar belakang berwarna putih, yang merupakan warna dominan dalam data penelitian ini. Sementara itu, foto 11 memperlihatkan papan larangan yang menggunakan kombinasi warna putih dan merah untuk menekankan pesan larangan yang disampaikan. Ada pun foto 5 menampilkan papan larangan dengan latar berwarna coklat kayu, yang mencerminkan upaya penyesuaian dengan lingkungan sekitar.

**Tabel 4.** Bahan Material yang digunakan

Material	Jumlah
Stiker	6
<b>Plastik</b>	<b>14</b>
Kayu dan Kaca	1
Kain	1
Kayu	6
Kertas	4
<b>Kertas Laminasi</b>	<b>16</b>
Besi	4
<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>52</b>

Aspek material pada papan larangan merupakan salah satu elemen penting yang turut mempengaruhi penyampaian pesan dalam ruang publik. Tabel 4 di bawah ini menunjukkan ragam material yang digunakan pada papan larangan yang ditemukan dalam data penelitian ini. Material yang paling banyak digunakan adalah kertas yang dilaminasi, sebanyak 16 buah, diikuti dengan plastik sebanyak 14 buah. Temuan ini sejalan dengan apa yang dituliskan oleh Iwata (2017) yang mengkritisi banyaknya penggunaan papan informasi publik termasuk papan larangan yang menggunakan material kertas yang dilaminasi. Kertas yang dilaminasi memang mudah dan murah untuk dibuat, namun tidak tahan lama (mudah rusak). Papan larangan yang terbuat dari kertas laminasi dan sudah rusak dapat mengotori pemandangan sekitar. Seperti yang terlihat di foto 13 di bawah ini.



Gambar 13: Papan larangan dari kertas laminasi yang rusak



Gambar 14: Papan larangan yang menyesuaikan dengan lanskap sekitar

Berbeda dengan papan larangan di foto 13 yang dibuat dengan kertas laminasi, foto 14 menampilkan papan larangan berbahan kayu yang tidak hanya tahan lebih lama, tetapi juga memiliki desain yang selaras dengan nuansa bangunan tradisional di Kyoto. Desain seperti ini mencerminkan estetika khas kota bersejarah tersebut. Menurut Hamaguchi (2021), papan larangan yang mempertimbangkan nilai estetika dan keselarasan lingkungan termasuk ke dalam kebijakan desain pembuatan papan informasi publik di Kyoto. Kebijakan ini mewajibkan adanya pemasangan papan larangan seperti ini di dekat pintu masuk kuil Budha dan juga kuil Shinto untuk menjaga ketertiban serta mendukung pelestarian situs-situs bersejarah.

Penggunaan pictogram pada papan larangan di Kyoto merupakan bagian dari upaya menciptakan papan informasi publik yang bersifat universal. Hal ini diatur dalam kebijakan “*Kankou Annai Hyoushiki Appuguredo Shishin*” (Pedoman Peningkatan Tanda Petunjuk Wisata) yang merekomendasikan penggunaan pictogram sebagai bentuk komunikasi visual yang dapat dipahami lintas bahasa. Dalam pelaksanaannya, Kyoto menggunakan simbol panduan JIS (*JIS guidance symbols*) dan pictogram buatan pemerintah Kyoto untuk larangan-larangan yang tidak tercakup dalam daftar JIS.

Namun, meskipun bertujuan untuk menciptakan desain yang universal, papan papan larangan tersebut tetap menyertakan teks dalam bahasa Jepang dan bahasa asing lainnya sebagai penjelas. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan pictogram jika masih diperlukan penjelasan teks. Menurut Honda (2017), pictogram bukanlah sekedar gambar ilustrasi, melainkan simbol visual yang dapat menyampaikan makna secara mandiri tanpa perlu kalimat pendukung. Dalam penelitiannya, Honda menemukan bahwa negara-negara di Eropa, papan informasi publik cenderung meminimalkan penggunaan bahasa dan mengandalkan desain visual yang sepenuhnya universal dengan hanya menggunakan pictogram.

Sebagaimana telah dijabarkan di atas, papan larangan di area wisata Gion tidak hanya menyampaikan makna melalui aspek kebahasaan, tetapi juga melalui elemen-elemen nonkebahasaan seperti warna, material tata letak serta penggunaan pictogram. Pendekatan multimodalitas dalam analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana makna larangan dikonstruksi, dengan merujuk pada teori multimodalitas yang dikembangkan oleh Kress & van Leeuwen (2006), yang menyatakan bahwa makna dibangun melalui interaksi berbagai mode semiotik seperti teks, gambar, warna, dan tata letak secara menyeluruh melalui kombinasi antara teks dan elemen visual, sehingga membentuk pesan yang efektif, estetis dan sesuai dengan konteks budaya lokal. Terlebih, Gion merupakan kawasan wisata yang menjual budaya lokal tradisional Jepang.

Dari segi warna, hasil penelitian menunjukkan dominasi warna putih sebagai latar utama papan larangan. Warna putih ditemukan pada 36 dari total 52 data. Warna ini dipilih karena memiliki keterbacaan tinggi dan kontras yang baik terhadap huruf atau simbol, sehingga informasi mudah didapatkan oleh pembaca. Penggunaan warna-warna mencolok seperti merah, kuning, digunakan secara terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa aspek warna dalam papan larangan tidak hanya mempertimbangkan fungsi komunikasi, tetapi juga nilai estetika yang sesuai dengan karakter kota tua Kyoto.

Selain warna, material papan juga menjadi penanda penting dalam menyampaikan tingkat formalitas, daya tahan, dan keselarasan dengan lingkungan sekitar. Berdasarkan data yang dihimpun, material yang paling sering digunakan adalah kertas laminasi (16 buah), plastik (14 buah), dan kayu (6 buah). Penggunaan kertas laminasi memiliki keunggulan dari sisi biaya dan fleksibilitas, tetapi rentan rusak dan dapat menurunkan estetika ruang publik jika tidak diperbaharui secara berkala. Sebaliknya, papan yang terbuat dari kayu atau logam lebih tahan lama dan sering kali dibuat dengan mempertimbangkan nilai estetika. Misalnya papan kayu yang menyesuaikan dengan bangunan-bangunan tradisional Jepang yang banyak terbuat dari kayu. Temuan ini sejalan dengan prinsip visibilitas dalam kebijakan 観光案内標識アップグレード指針 ‘Kankou Annai Hyoushiki Appuguredo Shishin’ yang menekankan pentingnya estetika dan kesesuaian lingkungan dalam perancangan papan informasi publik.

Terakhir, mengenai pictogram yang menjadi aspek visual lain yang penting dalam menyampaikan larangan secara universal. Dalam banyak kasus, pictogram digunakan untuk



melengkapi teks berbahasa Jepang dan asing, serta mempermudah pemahaman bagi wisatawan mancanegara. Misal simbol rokok dicoret untuk larangan merokok, atau simbol kamera dicoret untuk larangan memotret. Namun demikian, analisis ini juga menemukan bahwa tidak semua gambar merupakan piktogram, sehingga tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya teks penjelasan berupa teks. Penggunaan simbol yang terlalu kompleks atau tidak standar, dapat menimbulkan ambiguitas sehingga kerap disertai teks penjelas. Hal ini menguatkan pendapat Honda (2017: 147) bahwa idealnya piktogram harus memiliki makna mandiri dan dapat dipahami tanpa bantuan kebahasaan, namun dalam praktiknya, sinergi antara teks dan gambar masih dibutuhkan untuk memastikan akurasi pemahaman.

Dengan demikian, bahwa papan larangan di Kyoto merupakan wujud representasi multimodal yang menggabungkan mode linguistik dan visual dalam satu kesatuan. Bahasa, warna, bahan, dan simbol bekerja secara bersamaan untuk menyampaikan pesan secara efektif dalam konteks ruang publik yang berorientasi pada estetika dan pelayanan. Analisis multimodal ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi komunikasi yang digunakan di ruang publik Jepang, serta menunjukkan bagaimana nilai budaya lokal diinternalisasikan ke dalam bentuk-bentuk pesan visual.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa refleksi penting yang dapat diambil. Pertama, papan larangan di Kyoto tidak semata-mata berfungsi sebagai media penyampai aturan, melainkan juga merepresentasikan nilai-nilai budaya komunikasi publik Jepang, baik dari aspek kebahasaan maupun nonkebahasaan. Kedua, keberadaan papan larangan yang diselaraskan dengan lanskap tradisional Kyoto menunjukkan bahwa komunikasi visual tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga memiliki fungsi estetis yang memperkuat harmoni visual lingkungan.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa papan larangan di Kyoto tidak hanya berperan dalam pembentukan dalam menyampaikan perintah atau larangan, melainkan juga berkontribusi dalam pembentukan citra kota dan penguatan identitas budaya lokal. Integrasi antara elemen kebahasaan dan elemen non kebahasaan mencerminkan representasi multimodal atas nilai-nilai kesantunan, keindahan, dan keteraturan dalam ruang publik Jepang.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Nishijima (2019), Kim (2011), ditemukan bahwa bentuk kesantunan pada papan larangan di Jepang cenderung lebih polite dibanding ekspresi serupa di negara-negara barat maupun Korea. Selain itu, berbeda dengan temuan pada penelitian sebelumnya, yang menunjukkan kecenderungan dominasi salah satu ekspresi. Hasil pada penelitian ini memperlihatkan bahwa tidak ada kecenderungan penggunaan jenis ekspresi yang digunakan.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, salah satu aksi yang dapat dirumuskan adalah pemanfaatan papan informasi publik Jepang sebagai media ajar bahasa Jepang. Melalui papan larangan dan papan informasi publik lainnya, pembelajar tidak hanya akan mempelajari bahasa Jepang dari struktur gramatikalnya saja, tetapi juga memahami norma kesantunan, kebiasaan budaya, dan nilai sosial masyarakat Jepang.

## SIMPULAN

Papan larangan di Gion, Kyoto, menunjukkan variasi ekspresi berdasarkan tingkat kesopanan (polite atau impolite) dan bentuk penyampaian (eksplisit atau implisit). Penggunaan ragam ekspresi ini mencerminkan strategi komunikasi yang mempertimbangkan norma kesantunan dan konteks sosial. Ekspresi eksplisit seperti 「立入禁止」 '*tachiiri kinshi*' (dilarang masuk) disampaikan secara langsung, sedangkan ekspresi implisit polite seperti 「ごみは各自で持ち帰りましょう」 '*gomi wa kakuji de mochikaerimashou*' menyampaikan larangan secara halus melalui ajakan. Temuan ini menunjukkan bahwa papan larangan tidak hanya menyampaikan aturan, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai budaya komunikasi publik Jepang.

Mengenai kecenderungan penggunaan ungkapan larangan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan ekspresi larangan pada papan informasi publik di area Wisata Kyoto menunjukkan distribusi yang seimbang antara ekspresi *polite* dan *impolite*. Berbeda dengan temuan pada penelitian

sebelumnya, yang menunjukkan kecenderungan dominasi salah satu ekspresi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa tidak ada kecenderungan penggunaan jenis ekspresi yang digunakan. Salah satu faktor yang menjelaskan hal ini adalah tidak adanya regulasi yang jelas yang mengatur jenis ekspresi seperti apa yang harus digunakan. Di sisi lain, prinsip “*simple*” dalam kebijakan “*Kankou Annai Hyoushiki Appugurēdo Shishin*” (Pedoman Peningkatan Tanda Petunjuk Wisata) bisa menjadi salah satu faktor penyebab penggunaan ekspresi *impolite* yang singkat dan eksplisit, seperti penggunaan kata ‘*kinshi*’ 禁止 (Dilarang).

Dari segi nonkebahasaan, walaupun desain papan informasi publik di Kyoto mempunyai kebijakan untuk menyesuaikan dengan lanskap lingkungan sekitar, namun belum sepenuhnya dapat mengaplikasikan hal tersebut. Pada kenyataannya, warna putih menjadi warna latar papan larangan yang dominan. Hal ini karena warna putih dianggap dapat mempermudah keterbacaan. Sementara dari aspek material, penggunaan kertas laminasi dan plastik mendominasi, meskipun dianggap kurang tahan lama dan tidak selalu sesuai dengan nilai estetika. Terakhir, Kebijakan pemerintah Kyoto mendorong penggunaan pictogram agar informasi dapat dipahami secara universal. Namun demikian, teks dalam berbagai bahasa tetap dituliskan.

Terakhir, representasi multimodal yang terlihat pada papan larangan yang terdapat di area wisata Gion, Kyoto menggabungkan unsur kebahasaan dan nonkebahasaan seperti warna, material, tata letak, dan pictogram untuk menyampaikan pesan larangan secara efektif, etetis, dan kontekstual. Dominasi warna putih menunjukkan perhatian terhadap keterbacaan dan keselarasan visual, sementara pilihan material seperti kayu mencerminkan upaya mempertahankan nilai estetika tradisional. Penggunaan pictogram mendukung pemahaman lintas bahasa, meskipun dalam praktiknya masih memerlukan teks pendamping agar makna tersampaikan dengan akurat. Analisis ini menunjukkan bahwa papan larangan Kyoto bukan sekedar alat informasi, melainkan juga cerminan budaya lokal yang mengutamakan harmoni dalam komunikasi publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, M. 2022. Japanese and Indonesian Prohibitive Expressions on Prohibition Signs at Train Stations: A Linguistic Landscape Study: JAPAN EDU Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Bahasa Jepang, 7 (2), 94- 105. <https://11nq.com/xOzCP>
- Afifah, M. 2023a. Doubutsuen ni Okeru Kinshi Sain: Nihongo to Indonesia no “Kinshi Hyougen” no Hikaku: Kanazawa Daigaku Ningen Shakai Gakuiki Keizai gakurui Shakai gengogaku Enshu Ronbun-Shu, 18, 101-116. <https://encr.pw/ocyUc>
- Afifah, M. 2023b. Nihon to Indonesia no Gengokeikan ni Okeru Kinshi Sain no Hikaku. <https://kanazawa-u.repo.nii.ac.jp/record/2000372/files/Abstract-H-1821082009-MUTHI-AFIFAH.pdf>. Kanazawa University.
- Afifah, M., Sugihartono. 2024. Comparative Analysis of the Usage Expressions of COVID-19 Prevention Signs in Japanese and Indonesian: A Case Study of Modern Shopping Mal. CHIE: Jurnal Pendidikan Bahasa Jepang, 12 (1), 41-51. <https://encr.pw/av9G3>
- Backhaus, P. 2006. Multilingualism in Tokyo— A look into the linguistic landscape—: International Journal of Multilingualism, 3(1), 52–66.
- Brown, P. and S. Levinson. 1987. Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge: CambridgeUniversityPress
- Deng, J. 2014. A pragmatic analysis of public signs in China. Linguistica Atlantica, 33 (1), 30- 37. <https://journals.lib.unb.ca/index.php/la/article/view/22539>
- Honda, Hiroyuki. 2017. Pikutoguramu wa Irasuto de wa nai. Machi no Koukyou Sain wo Tenken Suru: gaikokujin ni wa dou Mieru ka. Taishukan Shoten, 143- 158.
- Iwata, Kazunari. 2017. Chui Kanki ga Oosugimasen ka. Machi no Kokyō Sain wo Tenkensuru— Gaikokujin ni wa Dou Mieruka: Taishukan Shoten, 71-80.
- Kishie, Shinsuke. 2011. Kanban, Hyojibutsu ni Mirareru Kinshi Hyogen no Gengokeikan. Uchiyama, Junzo (ed.), Nakai, Seiichi, dan Daniel Long (eds.), Sekai Gengokeikan Nihon no Gengokeikan: no naka no kotoba: Katsura Shobo, 218- 226.

- Kim, Sunin. 2011. Nihon to Kankokugo no Gengokeikan ni okeru Kinshi Hyougen: Basho niyoru Chigai wo Chushin ni: Meikai. 16, 53-62. <https://encr.pw/OAGk8>
- Kurabayashi, Hideo. 2020. Nihon no Kokyuu Sain no Suitaru: Buntairon Kenkyu. 66, 71-78.
- Kress, G., & van Leeuwen, T. 2006. Reading images: The Grammar of Visual Design (2nd ed): Routledge
- Landry, R., & Bourhis, R. Y. 1997. Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality: An Empirical Study. Journal of Language and Social Psychology, 16 (1), 23-49.
- Leech, G. N. 1983. Principles of Pragmatics: Longman.
- Long, D. 2014. Hibogowasha Kara Mita Nihongo no Kanbanno Goyouron Teki Mondai–Nihongo Kyouiku ni Okeru “Gengokeikan” no Ouyou–: Jinbungakuhou, 488, 1-22.
- Mubarak, M.H., Hayati, N., Haristiani, N. 2024. Politeness on Public Signs in Japanese and Indonesian Train Cars: A Linguistic Landscape Study: CHIE Jurnal Pendidikan Bahasa Jepang. 12(2), 86- 94. <https://11nq.com/k5yoe>
- Nishijima, Yoshinori. 2014. Kouyou Sain ni Okerru Gengokeikan no Nichidoku Hikaku– Atarashii Gengo Hikaku no Shuhou no Teian to Sono Yukousei no Kensho–: Doitsu Bungaku Roshu. 47, 32-46.
- Nishijima, Yoshinori. 2019. A Contrastive Study of Functionally Equivalent, but Semantically Different Sign Expressions in Japanese and German: An Analysis of Preferred Expression Styles: Intercultural Communication Studies. 28 (1), 152-157. <https://encr.pw/x4Vnv>
- Nishijima, Yoshinori. 2022. A Stylistic Analysis of Stickers on Cars as Linguistic Landscapes: Buntairon Kenkyu. 68, 1-16. <https://encr.pw/Gk7a5>
- Schulze, I. 2019. Bilder – Schilder - Sprache: Empirische Studien zur Text-Bild-Semiotik im öffentlichen Raum. Tübinger Beiträge zur Linguistik. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co.KG.
- Thongtong, T. 2016. A Linguistic Landscape Study of Signage on Nimmanhemmin Road, A Lanna Chiang Mai Chill-Out Street. Manusya: Journal of Humanities, 19 (3), 72-87. <https://encr.pw/MEPuL>